



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : U. SYIHABUDDIN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 13736

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.380.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah Seluas 167 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/89 m2 di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 251.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO FINO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 83.350.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.718.350.000
III. HUTANG	Rp.	620.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.098.350.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.